

Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral, Pemerintah, Dan Perbankan Dalam Stabilitas Keuangan Indonesia

Afifah Ismi Aulia¹, Yuladul Fitriah², Rini Puji Astuti³

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
e-mail: afifahismi1504@gmail.com, yuladulfitriah17@gmail.com, rinipuji.astuti11983@gmail.com

Abstract: This research examines the institutional relationship between the Central Bank, the Government, and Banking in maintaining financial stability in Indonesia. Financial stability is a crucial prerequisite for sustainable economic growth and the prevention of financial crises. The Central Bank, in this case Bank Indonesia, plays a central role in managing monetary policy and maintaining liquidity balance in the financial market. The Government is responsible for formulating fiscal policies and economic regulations to create stable economic conditions and support a healthy financial system. Meanwhile, banking functions as a financial intermediation institution that efficiently facilitates the flow of funds from surplus units to deficit units. This research uses a descriptive qualitative approach with secondary data analysis sourced from the annual reports of Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and national banking publications. The research results show that there is a synergistic relationship between the three institutions in maintaining financial stability. The monetary policy implemented by the Central Bank is capable of controlling inflation and liquidity, while the government's fiscal policy supports the strengthening of the real sector and economic infrastructure. On the other hand, banking plays an important role in maintaining a stable flow of credit and supporting national economic activities. Nevertheless, the lack of coordination between monetary, fiscal, and banking regulations can trigger imbalances and increase systemic risk.

Keywords: Financial Stability, Central Bank, Government, Banking.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hubungan kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Stabilitas keuangan merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pencegahan krisis finansial. Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, memiliki peran sentral dalam mengelola kebijakan moneter dan menjaga keseimbangan likuiditas di pasar keuangan. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan fiskal dan regulasi ekonomi untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mendukung sistem keuangan yang sehat. Sementara itu, perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memfasilitasi aliran dana dari surplus unit ke deficit unit secara efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta publikasi perbankan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sinergis antara ketiga institusi tersebut dalam menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral mampu mengontrol inflasi dan likuiditas, sementara kebijakan fiskal pemerintah mendukung penguatan sektor riil dan infrastruktur ekonomi. Di sisi lain, perbankan berperan penting dalam menjaga arus kredit yang stabil dan mendukung aktivitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, kurangnya koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi perbankan dapat memicu ketidakseimbangan dan meningkatkan risiko sistemik.

Kata Kunci: Stabilitas Keuangan, Bank Sentral, Pemerintah, Perbankan.

PENDAHULUAN

Stabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya krisis finansial yang dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan tidak menentu, menjaga stabilitas keuangan menjadi tantangan yang krusial bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Stabilitas keuangan mencakup kondisi di mana sistem keuangan—meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan—berfungsi secara efektif dan efisien, mampu menyerap guncangan eksternal, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Di Indonesia, tanggung jawab menjaga stabilitas keuangan menjadi tugas bersama antara Bank Sentral, Pemerintah, dan sektor Perbankan. Ketiga institusi tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang kuat, stabil, dan resilient terhadap gejolak ekonomi global maupun domestik. Dalam konteks ini, hubungan kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan memainkan peranan strategis dalam menjaga keseimbangan makroekonomi, pengendalian inflasi, serta pengawasan terhadap risiko sistemik di sektor keuangan.

Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, memiliki mandat utama dalam menjaga kestabilan nilai tukar, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui instrumen kebijakan moneter, Bank Indonesia berupaya

mengontrol likuiditas di pasar, menetapkan suku bunga acuan, serta melakukan intervensi di pasar uang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, sehingga tidak terjadi lonjakan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Instrumen seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi alat utama untuk mengarahkan likuiditas di pasar dan menentukan biaya pinjaman di sektor perbankan. Selain itu, operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Indonesia memungkinkan kontrol terhadap jumlah uang beredar sehingga stabilitas harga dapat tetap terjaga. Dalam situasi ekonomi global yang bergejolak, intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang pada gilirannya menjaga kestabilan harga impor dan tekanan inflasi.

Di sisi lain, Pemerintah berperan signifikan dalam merumuskan kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan anggaran negara, kebijakan perpajakan, dan regulasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang efektif dapat mendukung stabilitas keuangan dengan menjaga defisit anggaran yang terkendali dan mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa belanja negara dialokasikan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan utang negara yang bijak dan pengendalian defisit anggaran turut mendukung kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan. Selain itu, kebijakan perpajakan yang dirumuskan secara efektif juga mampu menjaga penerimaan negara tetap stabil di tengah fluktuasi ekonomi global. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga stabil dan inklusif.

Sementara itu, sektor Perbankan memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak defisit melalui aktivitas kredit dan investasi. Stabilitas sektor perbankan menjadi krusial dalam menjaga aliran likuiditas dan mendukung aktivitas ekonomi di masyarakat. Bank berperan dalam menyediakan akses pembiayaan kepada sektor riil, termasuk industri, perdagangan, dan UMKM, yang menjadi motor penggerak perekonomian. Namun, sektor perbankan juga rentan terhadap risiko sistemik, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Ketidakstabilan di sektor perbankan, seperti tingginya kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), krisis likuiditas, atau gagal bayar utang, dapat mengganggu sistem keuangan secara menyeluruh dan berpotensi menimbulkan krisis finansial. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi terhadap perbankan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Di Indonesia, peran pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan standar internasional.

Meskipun ketiga institusi tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, keterkaitan dan sinergi di antara mereka menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas keuangan. Bank Sentral, Pemerintah, dan sektor Perbankan perlu bekerja sama secara sinergis untuk merumuskan kebijakan yang terintegrasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi yang baik antara kebijakan moneter Bank Sentral, kebijakan fiskal Pemerintah, dan regulasi sektor perbankan diperlukan untuk mengantisipasi risiko sistemik, menjaga likuiditas, dan memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Forum strategis seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dalam memperkuat koordinasi kelembagaan di antara instansi-instansi tersebut. Kurangnya koordinasi kelembagaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, volatilitas pasar, dan meningkatnya risiko kredit di sektor keuangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Pemahaman yang lebih dalam mengenai sinergi kelembagaan ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif terkait peran masing-masing institusi dalam menjaga ketahanan sistem keuangan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah tantangan ekonomi global. Dalam era globalisasi dan keterbukaan pasar yang semakin meningkat, koordinasi kelembagaan yang kuat menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap stabil, berdaya tahan tinggi, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis hubungan kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam peran, fungsi, dan sinergi dari ketiga lembaga tersebut dalam mengelola stabilitas sistem keuangan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami keterkaitan antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Sentral, kebijakan fiskal yang dirumuskan oleh Pemerintah, serta peran sektor perbankan dalam menjaga likuiditas dan mencegah risiko sistemik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada publikasi resmi lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, serta artikel ilmiah dan jurnal penelitian yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai

kebijakan moneter, kebijakan fiskal, regulasi perbankan, serta indikator stabilitas keuangan seperti inflasi, suku bunga, dan Non-Performing Loan (NPL).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi, laporan tahunan, regulasi keuangan, dan publikasi ekonomi yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan dipilih dan disederhanakan untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik guna mempermudah interpretasi. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola hubungan antara kebijakan Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan terhadap stabilitas keuangan di Indonesia.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai laporan resmi dan literatur akademik. Selain itu, penelitian ini mengacu pada teori stabilitas keuangan dan hubungan kelembagaan sebagai kerangka konseptual dalam memahami bagaimana koordinasi antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan dapat memengaruhi stabilitas keuangan nasional. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran dan sinergi kelembagaan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Ketiga institusi tersebut, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, bekerja secara sinergis dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, sehat, dan tangguh terhadap tekanan ekonomi baik di tingkat domestik maupun global. Keterkaitan antara kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi perbankan yang terkoordinasi dengan baik terbukti mampu menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, serta meminimalisir risiko sistemik di sektor keuangan. Sinergi yang kuat di antara ketiga elemen ini menciptakan kerangka stabilitas finansial yang lebih kokoh, sehingga Indonesia mampu menghadapi tekanan ekonomi global, volatilitas pasar, dan perubahan dinamika ekonomi internasional.

Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, memainkan peran vital melalui kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate), yang menjadi patokan bagi perbankan dalam menetapkan suku bunga kredit dan simpanan. Kebijakan suku bunga ini merupakan alat yang digunakan untuk memengaruhi biaya pinjaman dan investasi, sehingga mampu mengendalikan laju inflasi dan mendorong stabilitas harga. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia menunjukkan efektivitasnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah fluktuasi ekonomi global. Selain itu, Bank Indonesia secara aktif melakukan operasi pasar terbuka (Open Market Operation/OMO) untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas likuiditas di pasar keuangan. Operasi pasar ini dilakukan melalui pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah yang berdampak langsung pada likuiditas perbankan. Ketika terjadi tekanan likuiditas di pasar, Bank Indonesia dapat melakukan injeksi likuiditas melalui pembelian surat berharga, sementara pada kondisi surplus likuiditas, Bank Indonesia dapat menarik uang beredar dengan menjual surat berharga.

Tidak hanya itu, melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada sektor perbankan. Kebijakan makroprudensial ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan memiliki ketahanan modal yang cukup dan tingkat kredit bermasalah yang terkendali. Rasio kecukupan modal yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia memiliki kapasitas yang baik untuk menyerap kerugian dan menghadapi tekanan finansial. Sementara itu, pengendalian terhadap NPL dilakukan untuk menjaga kualitas aset perbankan tetap baik dan meminimalisir risiko gagal bayar yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjalankan kebijakan fiskal yang berfokus pada stabilitas ekonomi dan pengembangan sektor riil. Kebijakan fiskal yang dirumuskan mencakup pengelolaan anggaran negara, pengendalian utang, dan pengalokasian belanja pemerintah untuk sektor-sektor produktif. Peningkatan belanja infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah, misalnya, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan stabilitas di sektor perbankan melalui peningkatan permintaan kredit. Kebijakan fiskal ekspansif pada sektor infrastruktur juga mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperluas basis ekonomi domestik. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, seperti pengendalian defisit anggaran, optimalisasi penerimaan pajak, dan peningkatan investasi publik. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas keuangan nasional.

Implementasi program stimulus ekonomi pada masa krisis, seperti pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi sangat signifikan. Pemerintah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi seperti bantuan sosial, subsidi bunga kredit, dan restrukturisasi kredit perbankan untuk menjaga likuiditas dan mengurangi tekanan pada sektor usaha. Melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, Pemerintah mampu menjaga arus likuiditas dan menstabilkan pasar keuangan di tengah tekanan ekonomi global. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam menekan laju penurunan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di masa-masa penuh ketidakpastian.

Sektor Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki tanggung jawab penting dalam menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor produktif melalui aktivitas kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia

relatif tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi, berkat regulasi ketat yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan dari Bank Indonesia. Rasio kecukupan modal (CAR) yang berada di atas batas minimal serta tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali mencerminkan stabilitas operasional yang baik. Rasio CAR yang tinggi mengindikasikan bahwa perbankan memiliki bantalan modal yang cukup untuk menyerap kerugian tak terduga, sementara rasio NPL yang rendah mencerminkan manajemen risiko kredit yang efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sektor perbankan masih menghadapi risiko signifikan yang berasal dari volatilitas nilai tukar, fluktuasi suku bunga global, serta ketidakpastian ekonomi internasional. Ketergantungan perbankan pada pendanaan jangka pendek dan eksposur terhadap utang valuta asing menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap manajemen risiko di sektor perbankan untuk mencegah dampak negatif terhadap stabilitas keuangan nasional.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, kebijakan fiskal oleh Pemerintah, dan regulasi perbankan oleh OJK memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Pertama, koordinasi antara Bank Sentral dan Pemerintah dalam merespons perubahan ekonomi global perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil bersifat adaptif dan preventif terhadap potensi krisis. Kedua, sektor perbankan memerlukan pengawasan yang lebih ketat terkait manajemen likuiditas dan eksposur risiko kredit, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ketiga, penguatan kelembagaan melalui forum strategis seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dan terkoordinasi dengan baik.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang terintegrasi dan pengawasan makroprudensial yang efektif dapat meminimalisir risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari Bank Sentral, Pemerintah, dan OJK untuk memperkuat kerjasama kelembagaan dan meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik domestik maupun global. Dengan demikian, stabilitas keuangan di Indonesia dapat tetap terjaga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan perbankan di Indonesia mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional.

a. Peran bank indonesia

Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab utama tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas moneter tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika tidak disertai dengan kestabilan sistem keuangan. Kedua hal tersebut—stabilitas moneter dan stabilitas keuangan—tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi dari satu mata uang. Kebijakan moneter dapat memengaruhi kondisi keuangan, begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan moneter. Sistem keuangan berperan sebagai jalur transmisi kebijakan moneter, sehingga apabila terjadi gangguan dalam sistem keuangan, maka kebijakan moneter tidak akan dapat dijalankan secara optimal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter juga dapat mengganggu sistem keuangan karena fungsinya menjadi tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, menjaga stabilitas sistem keuangan tetap menjadi bagian penting dari tanggung jawab Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia menjalankan lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran tersebut mencakup kebijakan dan instrumen strategis yang digunakan untuk memastikan ketahanan sistem keuangan, yaitu:

1. Menjaga Stabilitas Moneter

Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, salah satunya melalui pengaturan suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Penetapan kebijakan moneter harus dilakukan secara hati-hati dan seimbang, mengingat ketidakstabilan moneter bisa berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi. Jika kebijakan suku bunga terlalu ketat, kegiatan ekonomi bisa terhambat, sementara jika terlalu longgar, bisa memicu inflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadopsi kerangka kerja inflation targeting sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Mendorong Kesehatan Lembaga Keuangan

Peran penting lainnya adalah memastikan kinerja yang sehat dari institusi keuangan, khususnya perbankan, melalui regulasi dan pengawasan. Karena sektor perbankan merupakan bagian terbesar dari sistem keuangan nasional, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan instabilitas yang luas. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang kuat serta penerapan kebijakan yang efektif, termasuk disiplin pasar dan penegakan hukum. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara yang menerapkan disiplin pasar cenderung memiliki sistem keuangan yang lebih stabil. Sebagai upaya jangka panjang, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan mengimplementasikan standar internasional seperti Basel II.

3. Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank Indonesia juga berwenang mengatur dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Kegagalan penyelesaian transaksi oleh salah satu peserta sistem pembayaran dapat menimbulkan risiko

serius, termasuk risiko sistemik yang dapat menyebar luas. Untuk meminimalkan risiko ini, Bank Indonesia mengembangkan sistem pembayaran berbasis waktu nyata seperti Real Time Gross Settlement (RTGS) guna meningkatkan keamanan dan efisiensi. Dengan posisi sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki akses dan keahlian untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko dalam sistem tersebut.

4. Riset dan Pemantauan Risiko Keuangan

Melalui fungsi riset dan pemantauan, Bank Indonesia mampu memperoleh informasi penting yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Pendekatan macroprudential memungkinkan pemantauan terhadap kerentanan sektor keuangan serta mendeteksi potensi guncangan yang bisa berdampak sistemik. Hasil riset ini digunakan untuk merancang instrumen dan indikator guna mengukur serta memitigasi risiko yang ada. Rekomendasi dari hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna menjaga kestabilan sektor keuangan.

5. Sebagai Lender of the Last Resort (LoLR)

Dalam perannya sebagai penyedia likuiditas terakhir, Bank Indonesia bertindak sebagai jaring pengaman sistem keuangan, khususnya pada saat krisis. Fungsi ini memungkinkan Bank Indonesia memberikan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan dana, baik dalam kondisi normal maupun krisis, asalkan masalah tersebut bersifat sementara dan tidak berkaitan dengan solvabilitas. Namun, untuk menghindari timbulnya moral hazard, pemberian bantuan likuiditas dilakukan dengan syarat ketat dan berdasarkan pertimbangan risiko sistemik. Peran ini merupakan bagian dari tanggung jawab tradisional bank sentral dalam mencegah meluasnya instabilitas keuangan.

b. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengaruhnya bersifat multi-faceted, melibatkan kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang saling terkait. Ketidakstabilan dalam satu area dapat memicu dampak negatif pada keseluruhan sistem.

a. Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Keuangan

Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, secara langsung mempengaruhi stabilitas keuangan. Defisit anggaran yang besar dapat meningkatkan suku bunga dan inflasi, sehingga mengurangi daya beli dan kepercayaan investor. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang hati-hati dan terukur dapat membantu menstabilkan ekonomi dan mengurangi risiko sistemik. Pengelolaan utang pemerintah juga penting; utang yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan mengganggu stabilitas pasar.

b. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Keuangan

Bank sentral, yang biasanya independen tetapi tetap berada di bawah payung pemerintah, memainkan peran utama dalam menjaga stabilitas moneter. Melalui kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka, bank sentral dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar mata uang, dan memastikan likuiditas yang cukup di sistem keuangan. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan bank sentral sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan makro ekonomi yang konsisten.

c. Regulasi dan Pengawasan Sektor Keuangan

Pemerintah bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Kerangka regulasi yang kuat dan efektif sangat penting untuk mencegah risiko sistemik, melindungi konsumen, dan menjaga kepercayaan di pasar. Lembaga pengawas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, berperan dalam mengawasi bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal. Kemampuan lembaga pengawas untuk bertindak tegas dan efektif dalam menghadapi masalah keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem.

d. Stabilitas Politik dan Stabilitas Keuangan

Stabilitas politik juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Ketidakpastian politik dapat mengurangi investasi, meningkatkan risiko, dan menurunkan kepercayaan investor. Pemerintah yang stabil dan kredibel dapat memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

c. Peran Perbankan

Di Indonesia memainkan peran krusial dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Perbankan berfungsi sebagai penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman, mengalokasikan dana secara efisien dan membantu pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem perbankan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, karena perbankan merupakan tulang punggung dalam intermediasi keuangan.

Hubungan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan:

1) Intermediasi Keuangan

Perbankan membantu mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (tabungan) ke pihak yang membutuhkan dana (kredit). Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi.

2) Transmisi Kebijakan Moneter

Perbankan berperan dalam meneruskan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), seperti perubahan

suku bunga, ke sektor riil. Jika perbankan sehat dan berfungsi dengan baik, kebijakan moneter BI akan efektif dalam mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

- 3) Pembentukan Pasar Keuangan
Perbankan turut berperan dalam mengembangkan pasar keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal, yang penting untuk pembiayaan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Inklusi Keuangan
Perbankan juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memberikan akses pada layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani, termasuk daerah terpencil. Ini membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Sistem Pembayaran
Perbankan berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, termasuk pembayaran antar bank dan pembayaran elektronik.
- 6) Mengelola Risiko
Perbankan memiliki peran penting dalam mengelola risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Jika bank mampu mengelola risiko dengan baik, stabilitas sistem keuangan akan terjaga.

faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas koordinasi kelembagaan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia.

- a. Faktor-faktor Kunci Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Indonesia.

Efektivitas koordinasi kelembagaan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor kunci yang saling berkaitan. Berikut beberapa di antaranya:

- 1) Kerangka Hukum dan Regulasi yang Jelas dan Komprehensif
Keberadaan undang-undang dan peraturan yang jelas, konsisten, dan saling mendukung antara BI dan lembaga terkait (seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Keuangan) sangat penting. Kerangka hukum yang kuat memberikan landasan yang kokoh untuk koordinasi dan mengurangi ambiguitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Mekanisme Koordinasi yang Efektif
BI perlu memiliki mekanisme koordinasi yang terstruktur dan transparan dengan lembaga-lembaga terkait. Mekanisme ini dapat berupa forum-forum koordinasi formal (misalnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan – KSSK), pertukaran informasi rutin, dan saluran komunikasi yang lancar. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga juga krusial.
- 3) Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
Agar koordinasi berjalan efektif, peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam menjaga stabilitas keuangan harus jelas dan tidak tumpang tindih. Pembagian tugas yang tepat dapat mencegah konflik dan meningkatkan efisiensi. Koordinasi yang baik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mandat dan batas wewenang masing-masing lembaga.
- 4) Kualitas Informasi dan Data
Koordinasi yang efektif membutuhkan akses terhadap informasi dan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Pertukaran data yang lancar antar lembaga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang komprehensif. Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas data dan efisiensi koordinasi.
- 5) Kepercayaan dan Komunikasi yang Baik
Hubungan yang baik dan saling percaya antara BI dan lembaga terkait sangat penting. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai konsensus. Saling menghormati keahlian dan perspektif masing-masing lembaga juga krusial.
- 6) Kapasitas Kelembagaan
Lembaga-lembaga terkait harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjaga stabilitas keuangan. Hal ini mencakup sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan sistem teknologi informasi yang handal.
- 7) Kecepatan Respon Terhadap Perubahan
Sistem keuangan global sangat dinamis. BI dan lembaga terkait harus mampu merespon perubahan dengan cepat dan adaptif. Hal ini membutuhkan kemampuan analisis yang kuat, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan.
- 8) transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses koordinasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga legitimasi lembaga. Informasi mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil harus diakses publik secara mudah dan transparan.

b. Faktor-faktor Kunci Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Indonesia.

Efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia bergantung pada beberapa faktor kunci yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Berikut beberapa faktor tersebut:

- 1) Kerangka Hukum dan Regulasi yang Komprehensif dan Konsisten
Keberadaan undang-undang dan peraturan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung antar lembaga pemerintah (seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan/OJK) sangat penting. Kerangka hukum yang kuat menyediakan landasan yang kokoh untuk koordinasi dan mengurangi potensi konflik atau ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Peraturan yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dinamika ekonomi global juga diperlukan.
- 2) Mekanisme Koordinasi yang Terstruktur dan Transparan
Mekanisme koordinasi yang efektif melibatkan forum-forum resmi (misalnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK), pertemuan rutin antar lembaga, dan saluran komunikasi yang lancar dan responsif. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam kerangka koordinasi tersebut sangat krusial untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk membangun kepercayaan publik.
- 3) Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Lembaga
Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga-lembaga pemerintah terkait (misalnya, kebijakan fiskal vs. moneter) sangat penting untuk menghindari konflik dan meningkatkan efisiensi. Koordinasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mandat dan batas wewenang masing-masing lembaga, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat.
- 4) Kualitas Data dan Informasi
Koordinasi yang efektif membutuhkan akses terhadap informasi dan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Pertukaran data yang lancar antar lembaga memungkinkan analisis yang komprehensif dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi terkini. Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas data dan efisiensi koordinasi.
- 5) Kepercayaan dan Komunikasi Antar Lembaga
Hubungan yang baik dan saling percaya antar lembaga pemerintah sangat penting untuk keberhasilan koordinasi. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai konsensus. Saling menghormati keahlian dan perspektif masing-masing lembaga juga krusial.
- 6) Kapasitas Kelembagaan yang Memadai
Lembaga-lembaga terkait harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan sistem teknologi informasi yang handal. Pengembangan kapasitas ini mencakup pelatihan, peningkatan keahlian, dan akses ke teknologi terkini.
- 7) Kecepatan Respon terhadap Perubahan
Sistem keuangan global sangat dinamis. Lembaga pemerintah harus mampu merespon perubahan dengan cepat dan adaptif. Hal ini membutuhkan kemampuan analisis yang kuat, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan.
- 8) Akuntabilitas dan Transparansi
Akuntabilitas dan transparansi dalam proses koordinasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga legitimasi lembaga. Informasi mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil harus diakses publik secara mudah dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

c. Faktor-faktor Kunci Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Perbankan dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Indonesia

Efektivitas koordinasi antar lembaga perbankan di Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional bergantung pada beberapa faktor kunci. Koordinasi yang baik antar bank, dan antara bank dengan otoritas pengawas (seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan/OJK), sangat penting untuk mencegah dan mengatasi risiko sistemik.

- 1) Kerangka Regulasi yang Komprehensif dan Konsisten
Regulasi yang jelas, konsisten, dan komprehensif dari Bank Indonesia dan OJK membentuk dasar koordinasi yang efektif. Aturan yang transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepatuhan. Regulasi juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi dan perubahan di sektor keuangan.
- 2) Mekanisme Koordinasi yang Efektif

Mekanisme formal dan informal untuk koordinasi antar bank dan dengan otoritas pengawas sangat penting. Forum-forum koordinasi, pertukaran informasi reguler, dan saluran komunikasi yang lancar membantu dalam berbagi informasi penting, mengidentifikasi risiko, dan merumuskan respons yang tepat terhadap potensi krisis.

3) Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga perbankan dan otoritas pengawas harus jelas dan tidak tumpang tindih. Ini akan mencegah konflik dan meningkatkan efisiensi. Koordinasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mandat dan batas wewenang masing-masing pihak.

4) Sistem Informasi dan Pertukaran Data yang Terintegrasi

Akses ke informasi dan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sistem informasi dan pertukaran data yang terintegrasi antar bank dan dengan otoritas pengawas memungkinkan pemantauan risiko yang lebih efektif dan respons yang lebih cepat terhadap potensi masalah.

5) Kepercayaan dan Komunikasi yang Baik

Kepercayaan dan komunikasi yang baik antar bank dan dengan otoritas pengawas sangat penting untuk koordinasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu dalam mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai konsensus. Saling menghormati keahlian dan perspektif masing-masing pihak juga krusial.

6) Kapasitas Kelembagaan yang Memadai

Lembaga perbankan dan otoritas pengawas harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan sistem teknologi informasi yang handal. Pengembangan kapasitas ini mencakup pelatihan, peningkatan keahlian, dan akses ke teknologi terkini.

7) Kecepatan Respon Terhadap Perubahan

Sistem keuangan global sangat dinamis. Lembaga perbankan dan otoritas pengawas harus mampu merespon perubahan dengan cepat dan adaptif. Hal ini membutuhkan kemampuan analisis yang kuat, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan.

8) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses koordinasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga legitimasi lembaga. Informasi mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil harus diakses publik secara mudah dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Sinergi antara ketiga institusi ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem keuangan yang kuat, stabil, dan mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi, baik yang bersumber dari dinamika domestik maupun global. Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, menjalankan peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga stabilitas harga, nilai tukar rupiah, dan likuiditas di pasar keuangan. Melalui instrumen-instrumen moneter seperti suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate), operasi pasar terbuka, dan pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia mampu mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta meminimalisir risiko sistemik yang dapat mengguncang sektor perbankan. Selain itu, peran pengawasan terhadap perbankan yang dijalankan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa sektor perbankan tetap sehat dan resilient terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Di sisi lain, Pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting melalui implementasi kebijakan fiskal yang terarah dan efektif. Kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti peningkatan belanja infrastruktur, subsidi, dan program stimulus ekonomi, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan sektor riil. Pemerintah juga mengelola utang publik secara bijak untuk memastikan keberlanjutan fiskal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merespons krisis ekonomi global, seperti pandemi COVID-19, menunjukkan pentingnya sinergi kelembagaan dalam menjaga arus likuiditas, mengendalikan inflasi, dan menstabilkan pasar keuangan. Langkah-langkah fiskal yang diambil oleh Pemerintah juga turut mendukung stabilitas sektor perbankan dengan memperluas akses pembiayaan dan menjaga permintaan kredit tetap stabil.

Sektor Perbankan, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memainkan peran sentral dalam menyalurkan dana masyarakat kepada sektor produktif melalui kredit dan investasi. Penelitian ini menemukan bahwa sektor perbankan di Indonesia secara umum berada dalam kondisi sehat, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang memadai dan tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali. Meskipun demikian, risiko sistemik tetap ada, terutama terkait volatilitas nilai tukar dan perubahan suku bunga internasional yang dapat memengaruhi likuiditas dan eksposur utang valas di sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan manajemen risiko di sektor ini untuk mengantisipasi potensi krisis yang dapat mengguncang stabilitas keuangan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan yang efektif antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Keterpaduan dalam merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi perbankan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem keuangan yang tangguh. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, kolaborasi strategis melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dan mampu mengantisipasi perubahan pasar. Selain itu, implementasi kerangka regulasi makroprudensial yang kuat akan semakin memperkuat ketahanan sektor perbankan dari risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa stabilitas keuangan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh masing-masing institusi secara terpisah, tetapi juga oleh efektivitas hubungan dan koordinasi di antara Bank Sentral, Pemerintah, dan sektor Perbankan. Langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika ekonomi global akan memperkuat daya tahan sistem keuangan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi risiko krisis di masa depan. Untuk itu, peningkatan koordinasi, penguatan regulasi, dan pengawasan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia di era globalisasi yang penuh tantangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan jurnal penelitian ini yang berjudul Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral, Pemerintah, Dan Perbankan Dalam Stabilitas Keuangan Indonesia. Terima kasih kepada dosen pengampu matakuliah Kebanksentralan yang telah memberikan arahan dan motivasi, serta keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk pengembangan ilmu lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).
- Sigalingging, B. (2013). Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. *USU Law Journal*, 1(1), 14185.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., Qoriah, C. G., & Nasir, M. A. (2019). *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi.
- Sari, D. I. (2015). Analisis terhadap peranan dan strategi bank indonesia serta Pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di indonesia. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1).
- Hamdani, H., Wahyuni, N., Amin, A., & Sulfitra, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)(Periode 2014-2016). *Jurnal Emt Kita*, 2(2), 62-73.
- Febrianto, H. G., & Fitriana, A. I. (2020). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Diamond Dalam Perspektif Islam (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(1), 85-95.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.
- Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., ... & Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380-391.
- Andriani, F., & Mohamad, R. (2022). Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 1-15.
- Hamda, I. (2023). *Pengaruh kinerja keuangan dan ekonomi makro terhadap stabilitas perbankan syariah: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama Pandemi COVID-19* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Darisa, J. (2021). Suatu Tinjauan Terhadap Kelembagaan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(6).
- Sitepu, N. I. (2015). Peran Bank Syariah dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, 1(1), 55-74.
- Wowor, M. G., Tinangon, E. N., & Karwur, G. (2025). ANALISIS PERAN PENGAWASAN BANK INDONESIA UNTUK MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).
- Kartiko, G. (2017). ANALISIS TERHADAP KOORDINASI OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN LEMBAGA LAINYA DALAM PENGAWASAN PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 33-52.